



**BANK
MUAMALAT HARKAT**
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH



2022

LAPORAN

TRANSPARANSI

PENERAPAN

TATA KELOLA

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat
Posisi Laporan : 31 Desember 2022
Alamat : Jl Raya Bengkulu Seluma KM 32 Kec Sukaraja Kab Seluma Bengkulu
Nomor Telepon : 0736-7311407
Penjelasan Umum :

Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola adalah dokumen yang wajib disusun oleh BPRS Muamalat Harkat untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai kualitas penerapan tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) dalam kegiatan operasional, manajemen risiko, dan pengambilan keputusan. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab manajemen dalam memastikan bahwa BPRS Muamalat Harkat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola dan sesuai prinsip syariah. Melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan nilai Perusahaan dan kepercayaan stakeholder atau pemangku kepentingan yang terkait baik intern maupun ekstern.

BPRS Muamalat Harkat mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, dalam penerapan tata Kelola disetiap jenjang bagian pada BPRS Muamalat Harkat, secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam penerapan tata Kelola sebagai berikut :

1. Keterbukaan (transparency) mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan

2. Akuntabilitas (accountability) mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban

3. Tanggung jawab (responsibility) mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik

4. Independensi (independency) mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik

5. Kewajaran (fairness) mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik

Penerapan tata Kelola bagi BPRS paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 4. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS 5. Penanganan benturan kepentingan 6. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern 7. Penerapan manajemen risiko, termasuk system pengendalian intern. 8. Batas maksimum penyaluran dana
9. Rencana bisnis BPRS

Laporan yang kami sajikan Adalah laporan transparansi penerapan tata Kelola (GCG) tahun 2025 PT BPRS Muamalat Harkat dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (Self Assessment) pelaksanaan tata kelola PT BPRS Muamalat Harkat Posisi 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa

PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Posisi Laporan

31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	DHARMA SETIAWAN , SE, M.E.Sy	Direktur Utama	Direktur Utama
2	DERI HASPRIYANTI, SE	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS, - Direksi wajib melakukan pengelolaan BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar BPRS dan ketentuan peraturan perundang-undangan , - Pengelolaan BPRS harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah

Keterangan

- Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS, - Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan wajib melakukan pengelolaan BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar BPRS dan ketentuan peraturan perundang-undangan , -Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan dalam Pengelolaan BPRS harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah , - Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan wajib berkoordinasi dengan DPS dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah, - Wajib mencegah direksi bank utk tdk menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan dan peraturan perundang-undangan, - Mamantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh komitmen bank kepada OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, - wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada dirut dengan tembusan kepada dekom.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	Komisaris Utama	Sbg Dewan komisaris Utama
2	Andi Novianza Wirajati, ST	Komisaris Utama dan Independen	Sbg Dewan Komisaris

Rekomendasi kepada Direksi

- Dekom wajib memastikan penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi , - Dekom wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi , - Dekom wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS, - Dekom dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS, - Pengambilan keputusan oleh Dekom merupakan bagian dari tugas pengawasan Dekom.

Keterangan

- Dekom wajib memastikan penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi , - Dekom wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi , - Dekom wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS, - Dekom dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS, - Pengambilan keputusan oleh Dekom merupakan bagian dari tugas pengawasan Dekom.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	H. Efrial Susanto, Lc.MH	Ketua DPS	Ketua DPS

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

- Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur baru BPRS agar sesuai dengan fatwa DSN - MUI, - Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, - Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya, - Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS, - Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2
Nomor	Tanggal	Nomor
220/01/BMH/VIII/2022	30-08-2022	NIHIL

Keterangan

Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit				
2	Komite Pemantau Risiko				
3	Komite Remunerasi dan				

Keterangan

BPRS belum memiliki program kerja komite

BPRS tidak memiliki komite Form A0132

Keterangan

Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	DHARMA SETIAWAN , SE, M.E.Sy	53,000,000	0.86	-	0.00
2	DERI HASPRIYANTI, SE	0	0.00	-	0.00

Keterangan

Satu direksi (Direktur Utama) yang mempunyai kepemilikan saham pada BPRS Muamalat Harkat

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DHARMA SETIAWAN , SE, M.E.Sy	Nihil	Nihil	Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy
2	DERI HASPRIYANTI, SE	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

Direktur utama mempunyai hubungan keuangan sebagai salah satu pemegang saham pada BPRS Muamalat Harkat

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan	Pemegang Saham
1	DHARMA SETIAWAN , SE, M.E.Sy	Nihil	Nihil	Nihil
2	DERI HASPRIYANTI, SE	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

keluarga direksi BPRS Muamalat Harkat tidak ada yang menjadi anggota direksi lain, anggota dewan komisaris atau pemegang saham pada BPRS

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	85,000,000	1.00	-	0.00
2	Andi Novianza Wirajati, ST	100,000,000	1.00	-	0.00

Keterangan

Anggota dewan komisaris PT BPRS muamalat Harkat merupakan para pemegang saham

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada
BPRS

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank
Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	Nihil	Nihil	Yefriza, SE. MPPM.Ph.D
2	Andi Novianza Wirajati, ST	Nihil	Nihil	Andi Novianza Wirajati, ST

Keterangan

Anggota dekom sebagai pemegang saham pada BPRS, dan tidak sebagai anggota direksi atau dekom pada perusahaan lainnya.

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	Nihil	Nihil	Drs.H.A. Razie Jachya, Hj. Djalalah Razie, Hj. Elfriza,
2	Andi Novianza Wirajati, ST	Nihil	Nihil	H. Iskandar Ramis, SIP.M.Si

Keterangan

Keluarga anggota dewan komisaris hanya memiliki hubungan sebagai pemegang saham pada BPRS Muamalat Harkat

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPRS Lain/BPR/Lembaga/Perusahaan	Jabatan
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	Nihil	Nihil
2	Andi Novianza Wirajati, ST	Nihil	Nihil

Keterangan

Dewan komisaris tidak ada yang merangkap jabatan pada BPRS/Lembaga/Perusahaan lain

Rutin

Nama Lembaga Jasa PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat

Posisi Laporan 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1	H. Efrial Susanto, Lc.MH	PT BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara	Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Keterangan

Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Muamalat Harkat juga merangkap jabatan sebagai DPS BPRS MDSN (Maslahat Dana Syariah Nusantara) Kota Bengkulu

Form A.06.10

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji	2	504,000,000.00	2	186,000,000.00	1	34,560,000.00
2.	Tunjangan	2	109,899,872.00	2	20,300,000.00	1	2,880,000.00
3.	Tantiem	2	144,000,000.00	2	32,400,000.00	1	4,400,000.00
4.	Bonus	2	0.00	2	0.00	1	0.00
5.	Kompensasi Berbasis Saham	1	11,591,100.00	2	193,549,500.00	1	0.00
6.	Remunerasi-Lainnya	2	410,359,944.00	2	9,200,000.00	1	2,880,000.00
	Total Remunerasi		1,179,850,916.00		441,449,500.00		44,720,000.00
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	2	0.00	2	0.00	1	0.00
2.	Transportasi	2	28,392,000.00	2	4,477,600.00	1	0.00
3.	Kesehatan	2	7,852,500.00	2	0.00	1	0.00
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	2	0.00	2	2,910,000.00	1	361,000.00
	Total Fasilitas Lain		36,244,500.00		7,387,600.00		361,000.00
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1,216,095,416.00		448,837,100.00		45,081,000.00

Keterangan

Paket atau kebijakan remunirasi dan fasilitas lain bagi direksi, dekom dan DPS ditetapkan pada RUPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat
Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1.33
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1.46
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	1.00
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	2.23
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0.38
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0.31

Keterangan

Gaji karyawan ditetapkan pada SK direksi, sedangkan kebijakan remunirasi dan fasilitas lain bagi direksi, dekom dan DPS ditetapkan pada RUPS. ilustrasi rasio perbandingan gaji dapat dilihat pada tabel diatas, yang meliputi kompensasi per bulan untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan tetap pada PT BPRS Muamalat Harkat. Untuk Rasio gaji DPS tertinggi terhadap gaji DPS terendah BPRS memberikan nilai rasio 1.00 karena BPRS baru memiliki 1 orang anggota DPS

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat
Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	28-07-2022	2	Rapat pembentukan Dekom baru (Andi Wirajanti), Pembahasan Risalah RUPS, Pembahasan staf ahli
2	22-09-2022	2	Analisis laporan keuangan bank, pengawasan kinerja direksi
3	29-11-2022	2	Pembahasan kinerja bank, pengawasan kinerja direksi, RBB
4	13-12-2022	2	Pengesahan RBB

Keterangan

Rapat dilakukan oleh kedua dewan komisaris yaitu Yefriza dan Andi Novianza Wirajati

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	4	0	100.00
2	Andi Novianza Wirajati, ST	4	0	100.00

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat
Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	27-01-2022	4	1. Tindak lanjut hasil pengawasan bulan januari 2022, 2. Perbaikan kutipan ayat Alquran pada akta perjanjian pembiayaan murabahah an Yuliani, no Akad 3122.0128, no Kontrak: 43101030441, tujuan pembiayaan Pembelian Kebun Sawit
2	24-02-2022	4	1. Tindak lanjut hasil pengawasan bulan Februari 2022, 2. Penyempurnaan akad Murabahah dengan Wakalah, pada pasal Definisi Wakalah, contoh pada akta perjanjian an Syarifuddin, No akad: 3122.0009, No Kontrak: 4310102922
3	24-03-2022	4	2. Tindak lanjut hasil pengawasan bulan maret 2022, 2. Penambahan Pasal Pengawasan Objek Murabahah dalam akta perjanjian Murabahah dengan Wakalah
4	28-04-2022	4	1. Tindak lanjut hasil pengawasan bulan april 2022, 2. Problem akad IMBT a. Kedudukan obyek jaminan milik bank tetapi atas nama nasabah b. Objek ijarah menjadi jaminan fiducia
5	26-05-2022	4	1. Tindak lanjut hasil pengawasan bulan mei 2022. 2. Dana sosial non halal a. Denda/tazir b. Bunga Bank Bengkulu no rek 3010204006276 c. Giro Bank Mandiri no rek 17900036666018
6	23-06-2022	4	1. Tindak lanjut hasil pengawasan bulan juni 2022, 2. Laporan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah a. Zakat perusahaan BMH b. Zakat direksi dan karyawan BMH
7	27-07-2022	4	1. Tindak lanjut hasil pengawasan bulan juli 2022, 2. Materi rapat a. jaminan barang dalam IMBT (tetap mengacu ketentuan yg ada dalam materi pelatihan) b. meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS 1. mengenai perhitungan dan pencatatan pembayaran bonus (beberapa deposit) atau 2. bagi hasil kepada nasabah penghimpunan dana 3. pembayaran bagi hasil kepada bank lain, 4. pencatatan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, 5. penempatan pada bank konvensional, dan 6. pendapatan nonhalal lain, 7. serta pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf posisi akhir bulan juni 2022
8	24-08-2022	4	1. Tindak lanjut hasil pengawasan bulan agustus 2022, 2. Persiapan laporan Hasil pengawasan DPS SMT 1 tahun 2022, 3. Tindak lanjut hasil exit meeting dengan OJK Prov Bengkulu terkait Laporan pengawasan DPS terhadap Produk dan kegiatan BMH semester 1 dan 2 tahun 2021
9	27-09-2022	4	1. Tindak lanjut hasil pengawasan bulan september 2022, 2. Rencana Penambahan Anggota DPS
10	25-10-2022	4	1. Tindak lanjut hasil pengawasan bulan oktober 2022 a. Perbaikan judul Akta Perjanjian Qardulhasan an Dr. Abdul Hafiz M.Ag tertulis PERJANJIAN KERJASAMA b. Mereview kembali akad Qordh dalam Pembiayaan Syariah

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat
Posisi Laporan : 31 Desember 2022

11	15-11-2022	4	1. Tindak lanjut hasil pengawasan bulan november 2022. 2. Laporan Hasil Pra Ijtima Sanawi DPS 27,28 September 2022 a Sosialisasi Ketentuan OJK terbaru bagi BPRS b Sharing materi fatwa penghimpunan dana dengan wakalah bil istismar c Sharing materi Akad Samsaroh d Sharing materi pelunasan utang Murabahah sebelum jatuh tempo e Bedah kasus implementasi murabahah di LKS f Beda kasus Pembiayaan Ultra mikro
12	22-11-2022	2	1. Perbaiki SOP DPS PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu
13	14-12-2022	4	1. Tindak lanjut hasil pengawasan bulan desember 2022 2. Persiapan laporan Hasil Pengawasan DPS SMT 2 tahun 2022 3 Sosialisasi Materi Ijtima Sanawi DSN-MUI XVIII 1 S/D 2 Desember tahun 2022 a Perkembangan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia b Perkembangan pasar modal di Indonesia c Perkembangan industry keuangan Non Bank Syariah Indonesia d Kebijakan keuangan berkelanjutan di OJK serta kaitannya dengan keuangan syariah e Perkembangan suku Negara di Indonesia f Ketentuan tentang Payment Gateway E money syariah dan instrument pasar uang syariah g Ketentuan LPS tentang penjaminan dan Resolusi Bank Syariah h Sosialisasi Program BAZNAS i Pandangan DSN MUI terkait isu isu terbaru dalam ikhtiar mengembangkan Ekonomi dan Keuangan syariah

Keterangan

BPRS baru memiliki satu anggota DPS sehingga belum ada rapat antar anggota DPS, walaupun demikian DPS mengikuti rapat pengurus yang dihadiri oleh : 1. Efrial Susanto (Ketua DPS), 2. Dharma Setiawan (Direktur Utama), 2. Deri Haspriyanti (Direksi), 3. Syapri (Ka. Pemasaran) untuk yang rapat tanggal 22 November 2022 yang hadir 1. Efrial Susanto (Ketua DPS), 2. Andi Novianza Wirajati (Dewan Komisaris)

Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah - Kehadiran
Rapat

Rutin

Nama Lembaga Jasa

PT Bank Perekonomian Rakyat

Posisi Laporan

31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	H. Efrial Susanto, Lc.MH	13	0	100.00

Keterangan

Anggota DPS baru satu. Rapat antar anggota DPS belum ada, walaupun demikian DPS hadir pada saat ada rapat pengurus yang diikuti oleh DPS sebanyak 13 kali, kehadiran rapat dilakukan secara fisik bukan secara telekonferensi

Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

Rutin

Nama Lembaga Jasa

PT Bank Perekonomian Rakyat

Posisi Laporan

31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	1	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	1	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan

Ditemukannya Fraud pada pegawai tetap yaitu pengelapan uang nasabah, masih dalam tahap penyelesaian

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat
Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total		

Keterangan

Tidak ada permasalahan hukum (pidana/perdata) pada periode laporan tahun sebelumnya dan periode tahun laporan

Form A.11.00

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat
Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

**Tidak terdapat transaksi yang mengandung
benturan kepentingan**

Keterangan

BPRS Muamalat Harkat tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa

PT Bank Perekonomian

Posisi Laporan

31 Desember 2022

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	12-01-2022	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 1	Kepsek TK IT (Asma)	200,000
2	13-01-2022	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 2	Nasabah Deposito (Yurmaini)	100,000
3	14-02-2022	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit (Rawat inap) 1	Karyawan (Wiknu)	200,000
4	14-02-2022	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit (Rawat inap) 2	Anak Karyawan (Filza Z)	200,000
5	14-02-2022	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit (Rawat inap) 3	Anak Karyawan (anak wiknu)	200,000
6	14-02-2022	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit (Rawat inap) 4	Anak Karyawan (wiknu)	200,000
7	25-03-2022	Kegiatan Sosial	Acara Majelis Taqlim	Panitian acara desa Lubuk sahung	500,000
8	08-04-2022	Kegiatan Sosial	Bantuan acara buka puasa bersama	Panitia Masjid Raya	2,500,000
9	12-07-2022	Kegiatan Sosial	BY Qurban BPRS Muamalat Harkat	Masyarakat menerima qurban dlm	8,766,000
10	16-08-2022	Kegiatan Sosial	Bantuan dana HUT RI KE77 Kel Betungan	Panitian HUT RI kel Betungan	500,000
11	07-09-2022	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit (Rawat inap) 5	Anak Karyawan (Sugiyatno)	200,000
12	14-09-2022	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit (Rawat inap) 6	Anak Karyawan (Fendy eko w)	200,000
13	14-09-2022	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit (Rawat inap) 7	Anak Karyawan (Arianti F)	200,000
14	20-09-2022	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit (Rawat inap) 8	Anak Karyawan (Wiknu ketahun)	200,000
15	14-10-2022	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit (Rawat inap) 9	Anak Karyawan (Miko Daryanto)	200,000
16	17-10-2022	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit (Rawat inap) 10	Anak Karyawan (Hendri)	200,000
17	25-10-2022	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit (Rawat inap) 11	Anak Karyawan (Aris Purwanto)	200,000

Keterangan

BPRS tidak ada kegiatan yang mengandung politik

Nama BPRS : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat
Periode Laporan : 31-12-2022
Alamat : Jl Raya Bengkulu Seluma KM 32 Kec Sukaraja Kab Seluma
Nomor Telepon : 0736-7311407
Modal Inti : 9,420,764,154.00
Total Aset : 78,997,326,335.00
Bobot Faktor : B
Status Audit Ekstern : Diaudit
Nilai Komposit : 2.1
Peringkat Komposit : 2
Analisis : BPRS Muamalat Harkat sudah melakukan transparansi dalam

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan 31 Desember 2022

Bobot Faktor B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.200	1.00	0.80	0.20	2.00	0.40	Kelamáhannya : Direksi masih perlu mengimplementasikan semua ketentuan yang berlaku agar kedepannya bank lebih baik lagi Kelebihannya : Direksi sudah memiliki pengetahuan yang cukup memadai dan sudah berusaha menerapkan ketentuan yang ada sehingga bank dapat tumbuh dan sehat, ketentuan dari OJK sudah diupayakan penerapannya pada bank
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.150	1.06	0.85	0.20	2.11	0.32	Kelemahannya : Dekom masih perlu meningkatkan pengetahuan demi kemajuan bank kedepannya Kelebihannya : Dekom telah memenuhi semua ketentuan dari OJK

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan 31 Desember 2022

Bobot Faktor B

Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0.100	1.10	0.92	0.24	2.26	0.23	Kelamáhannya : Anggota DPS baru satu sehingga belum memenuhi ketentuan dari OJK, untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS belum maksimal Kelebihannya : DPS telah memenuhi semua ketentuan dari OJK, dan selalu berusaha memberikan perbaikan terhadap kegiatan2 operasional bank agar sesuai dengan prinsip syariah
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Bank belum memiliki Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0.075	1.50	0.80	0.25	2.55	0.19	Kelemahannya : Bank belum sepenuhnya melaksanakan prinsip syariah, terbukti masih ditemukannya pelanggaran pada ketentuan Kelebihannya : Bank berupaya memperbaiki kesalahan dan memenuhi ketentuan sesuai dengan prinsip syariah agar kedepannya bisa lebih baik lagi

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan 31 Desember 2022

Bobot Faktor B

Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0.075	1.00	0.80	0.20	2.00	0.15	kelemahannya : Bank belum menemukan adanya benturan kepentingan sehingga belum ada kesimpulan untuk kelemahan faktor ini Kelebihannya : Apabila ada permasalahan bank selalu menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat untuk kebaikan bank.
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0.075	1.10	1.00	0.20	2.30	0.17	Kelemahannya : FE kepatuhan masih perlu belajar dan memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku Kelebihannya : FE Kepatuhan berupaya meningkatkan pengetahuan baik secara otodidak atau pun yang diberikan oleh pelatihan-pelatihan. \n

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan 31 Desember 2022

Bobot Faktor B

Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0.075	1.10	0.90	0.20	2.20	0.17	Kelemahannya : FE Audit Inter masih beluam memahami ketentuan dan peraturan secara sempurna kelebihannya : FE Audit Intern berupaya meningkatkan pengetahuan baik secara otodidak atau pun yang diberikan oleh pelatihan-pelatihan.
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0.025	1.00	0.80	0.20	2.00	0.05	Kelemahannya : Fungsi Audit Ekstern belum berlangsung sempurna karena pada saat pemeriksaan masih memerlukan informasi tentang produk syariah Kelebihannya : Hasil penilaian dari KAP transparan dan sesuai dengan kondisi bank yang sesungguhnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan 31 Desember 2022

Bobot Faktor B

Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kelemahannya : Penerapan manajemen risiko belum berlaku secara efektif karena masih baru diterapkan pada bank Kelebihannya : Dengan mulai diterapkannya manajemen risiko, bank bisa lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan guna meminimalisir risiko yang ada \n
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0.050	1.50	1.00	0.20	2.70	0.14	Kelemahannya : Bank belum memiliki SOP BMPD Kelebihannya : Belum adanya pelanggaran yang dilakukan oleh bank terhadap ketentuan BMPD sesuai dengan peraturan berlaku
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0.050	1.00	0.80	0.20	2.00	0.10	Kelemahannya : Masih ditemukan target - target yang belum tercapai sesuai dengan rencana bank Kelebihannya : Dari RBB bank belajar melihat naik turunnya pertumbuhan bank dari tahun ketahun apakah sudah terealisasi atau belum rencana yang dibuat

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan 31 Desember 2022

Bobot Faktor B

Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0.050	1.50	0.90	0.25	2.65	0.13	Kelemahannya : Masih belum memiliki daya tarik yang kuat terhadap produk yang ditawarkan kepada para nasabah penabung maupun pembiayaan terbukti belum adanya kenaikan yang signifikan terhadap produk kami Kelebihannya : Bank selalu berusaha terbuka terhadap kondisi keuangan dan non keuangan dengan mempublikasikannya ke media elektronik (website) maupun non elektronik (brosur, spanduk, media masa dll)
Nilai Komposit						2.1	
Peringkat Komposit						Baik	



BANK MUAMALAT HARKAT
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Penerapan Tata Kelola

Dengan ini kami memberikan persetujuan atas Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2022 untuk dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bengkulu, 30 Januari 2023

Direktur Utama

(Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy)



Komisaris Utama

(Yefriza, SE.MPPM, Ph.D)



Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Sandi BPRS : 620052
Nama BPRS : P T BPRS MUAMALAT HARKAT
Jenis BPRS : BPRS B (Modal inti < 50.000.000.000)
Tahun : 2022

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2.05	2
Analisis	
<p>BPRS Muamalat Harkat sudah melakukan transparansi dalam menyampaikan laporan dapat dilihat dari 11 faktor penilaian self assesment tata kelola BPRS, dimana nilai Struktur, Proses penerapan tata kelola, Hasil penerapan tata kelola, sudah memenuhi ketentuan SEOJK No 09/SEOJK.03/2022 dengan peringkat komposit dua (2) yang berarti tata kelola BPRS sudah baik. walaupun masih ditemukan kekurangan dalam penerapan ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam kegiatan operasional perusahaan. BPRS selalu berusaha memperbaiki penerapan tata kelola, terutama terkait pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko. Pelanggaran ketentuan terkait laporan BPRS kepada OJK tahun 2022 masih ditemukan, akan tetapi BPRS sudah menerima sanksi baik dalam bentuk teguran maupun denda, fokus kedepannya manajemen akan memperbaiki Non Performing Financing (NPF), pemantauan pembiayaan yang bermasalah, perbaikan kualitas analisa pembiayaan dan pengelolaan aset Bank yang optimal terhadap operasional perusahaan. dan lebih mengutamakan manajemen risiko pada setiap kegiatan operasional bank, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan syariah..</p>	

Bengkulu, 30 Januari 2023

Direktur Utama

(Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy)



Komisaris Utama

(Yefriza, SE.MPPM, Ph.D)